



Pemudik Masih Masuki DIY

JOGJA-Jumlah pendatang yang masuk ke DIY terus meningkat jelang Lebaran 2020.

Jumali, Lukas Subarkah, & David Kurniawan
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Meningkatnya jumlah pendatang ini menimbulkan kekhawatiran bertambahnya kasus Covid-19.
- ▶ Pemda DIY berharap Pemerintah Pusat mengevaluasi kebijakan pelonggaran transportasi.

Larangan mudik yang sudah diberlakukan pemerintah sejak beberapa waktu lalu tidak menyurutkan perantau kembali ke DIY. Pemkab Bantul memperkirakan hingga hari H Lebaran ada sebanyak 6.000 pendatang masuk ke wilayah Bantul. "Kemungkinan mencapai angka 6.000. Sebab, kami melihat peningkatan terus terjadi setiap harinya," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul Fenty Yusdayati, Selasa (19/5).

Fenty mencatat setiap harinya minimal ada 100 orang hingga 200 pendatang ke wilayahnya. Jika pada Minggu (17/5) ada sebanyak 5.300 pendatang, jumlah ini meningkat menjadi 5.550 pendatang pada Selasa (19/5) pagi. "Dari jumlah tersebut, pendatang terbanyak ada pergeseran. Jika sebelumnya di Kecamatan Imogiri, saat ini di Kecamatan Kasihan dengan total sebanyak 661 pendatang," kata Fenty.

▶ Halaman 7

Pemudik Masih...

Meningkatnya jumlah pendatang ini menimbulkan kekhawatiran bertambahnya kasus Covid-19. Saat ini saja, ada 258 pasien dalam pengawasan (PDP) tersebar di seluruh kecamatan di Bantul. Selain PDP tercatat jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 53 orang di mana, sebanyak 16 di antaranya berhasil sembuh dan dua lainnya meninggal dunia. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) hingga Senin (18/5) tercatat sebanyak 874 orang. "Dengan kondisi ini memang cukup menjadi perhatian bersama," kata Fenty.

Fenty berharap agar tidak ada pelanggaran mengenai protokol kesehatan di wilayahnya. Sebab, kata dia, hampir semua kecamatan di Bantul saat ini kedatangan pemudik. Di sisi lain, adanya kebijakan dari Pemda DIY yang kini bersiap menghadapi kondisi *new normal* seperti yang digaungkan Pemerintah Pusat juga, diharapkan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di Bantul.

Di Gunungkidul meski 989 pemudik diminta balik arah saat masuk wilayah perbatasan Gunungkidul, tetap saja ada pemudik yang lolos.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Gunungkidul, Enny Nurwidiastuti mengatakan ada tujuh titik penyekatan untuk pemantauan pemudik. Menurut dia, upaya penyekatan terus dilakukan sesuai

dengan imbauan pemerintah tentang larangan mudik. Hasil dari pendataan yang masuk, warga yang diminta putar balik terus bertambah. Total hingga Selasa sudah ada 25 sepeda motor dan 126 roda empat yang diminta balik arah.

Meski ada upaya penyekatan, tetap saja ada pemudik yang berhasil lolos. Hal ini terlihat dari data pemudik yang dimiliki oleh Pemkab Gunungkidul. Hingga Selasa siang ada 13.358 pemudik yang tiba di kampung halaman.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul, Kelik Yudiantoro mengatakan pendataan pemudik mengacu pada program Sistem Informasi Desa (SID) yang ada di setiap desa. "Ada pendataan dan operator desa akan mengunggah ke SID," katanya.

Kelik menuturkan hingga saat ini masih ada penambahan jumlah pemudik. Hanya saja, untuk jumlah tidak terlalu besar karena di kisaran 100 orang. Sebagai contoh untuk Selasa pertambahan pemudik hanya 116 orang dibandingkan jumlah di hari sebelumnya. "Pertambahan masih ada, tapi tidak signifikan seperti pada saat awal pandemi," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Pemkab Sleman, hingga Selasa ada 7.782 orang pemudik yang sudah tiba di Bumi Sembada. Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sleman, Shavitri

Nurmaladewi menuturkan angka tersebut masih mungkin bertambah jelang Hari Raya Idulfitri, dan penerimaan mahasiswa baru. Kendati begitu, Pemkab Sleman belum mengeluarkan pelonggaran sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bila ada pemudik atau pendatang yang datang, maka gugus tugas yang bertempat di tingkat dusun, RT, atau RW harus segera mendata. Selanjutnya informasi tersebut dilaporkan kepada puskesmas dan gugus tugas kabupaten.

"Kedatangan pemudik dan pendatang diserahkan semuanya kepada pihak RT sampai Desa," katanya.

Hal berbeda terjadi di Kota Jogja. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jogja, Pemkot Jogja, Octo Noor Arafat menyatakan jumlah pemudik yang datang ke Kota Jogja kurang dari 10 orang per hari. Penambahan pemudik dari Minggu (17/5) ke Senin (18/5) contohnya hanya ada empat orang. Sementara satu hari setelahnya yakni pada Selasa penambahan pemudik hanya enam orang. Octo menduga penambahan pemudik yang kecil tersebut dipengaruhi adanya aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah.

Pelonggaran Transportasi

Pemda DIY berharap Pemerintah Pusat mengevaluasi kebijakan pelonggaran transportasi. Sekda DIY, Kaadrmanta Baskara Aji, menjelaskan pada dasarnya kebijakan pelonggaran transportasi bagus karena memberi kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan fasilitas transportasi untuk keperluan mendesak.

"Misal petugas yang menangani Covid-19 di daerah, masyarakat yang orang tuanya meninggal di daerah asalnya dan sebagainya. Tapi di lapangan terjadi masalah. Apakah iya yang punya keperluan khusus itu bisa sebanyak itu?" ujarnya.

Beroperasinya kembali perjalanan udara dengan pembatasan penerbangan, membuat orang terkonsentrasi di satu penerbangan sehingga menimbulkan kerumunan dan berdesakan. Ia juga menyoroti ditemukannya surat-surat yang menjadi syarat perjalanan dipalsukan.

Menyikapi fenomena di lapangan ini, menurutnya manfaat dan persoalan dalam pelonggaran transportasi ini perlu dievaluasi. "Dengan memberi kesempatan bepergian ada keuntungan, tapi kehadiran orang yang tidak dengan alasan penting akan memunculkan persoalan baru," katanya.

Untuk itu, ia pun memberi opsi masukan sebagai evaluasi kebijakan. *Pertama*, sebaiknya jangan dilonggarkan kalau memang disalahgunakan banyak orang.

Kedua, kalau mau dilonggarkan, protokolnya harus lebih diperkuat.

Di DIY kata dia, baru satu orang yang mengajukan surat permohonan perjalanan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, yakni mahasiswa yang orang tuanya sakit. Sementara ASN yang ketentuannya harus mengajukan izin ke eselon satu, belum ada.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto, mengatakan pascaditerapkannya pelonggaran transportasi, setidaknya terdapat lonjakan transportasi sebanyak 25%.

Pengendalian Transportasi

Pemerintah Pusat membagi pengendalian transportasi di masa pandemi Covid-19, dan menjelang mudik Lebaran pada tiga fase, yakni fase jelang Lebaran antisipasi pemudik, fase hari H Lebaran, dan fase arus balik Lebaran 2020.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan ketiga fase pengendalian transportasi ini berlaku berdasarkan rentang waktunya, mulai dari 18 Mei 2020 hingga 23 Mei 2020, fase 24 Mei–25 Mei 2020 dan fase arus balik.

"Di jalan ada tiga fase antisipasi, arus transportasi yang mesti dikendalikan, fase pertama sampai dengan 23 Mei 2020, penguatan posko di lokasi cek poin jalan tol dan nontol, satpol PP, Polri, TNI,

ditambah, sementara pemudik akan dikembalikan [ke titik awal keberangkatan]," jelasnya, Selasa.

Dia juga menyebut travel yang mengangkut pemudik akan ditindak tegas bahkan kendaraannya bisa sampai dilarang beroperasi. Sementara jalan-jalan kecil akan dijaga ketat pihak kepolisian.

Dia menyebut bus yang boleh mengangkut penumpang hanya bus yang sesuai syarat dengan stiker di bus sebagai tanda pengenal. Angkutan berstiker ini disebut sudah lolos verifikasi dan bukan mengangkut pemudik.

"Fase selanjutnya 24–25 Mei, fase satu tetap dilakukan, konsentrasi penyekatan bergeser di dalam Jabodetabek, DKI Jakarta terutama pengetatan keluar masuk orang dan pelarangan mudik yang disebut mudik lokal," ujarnya.

Tindakan tegas pun dilakukan dalam penyekatan di dalam tol bagi pemudik jarak pendek, untuk jarak Jakarta-Cirebon, Jakarta-Brebes, dan Jakarta-Bandung. Para pemudik kendaraan pribadi roda empat ini akan dikeluarkan di KM 31 tol Jakarta-Cikampek.

Adapun fase pasca Lebaran ada penguatan personel, penyekatan kendaraan keluar masuk Jabodetabek. Selain itu, penyempotan desinfektan pun dilakukan di rest area diatur dengan bekerja sama dengan pengelola tol. (Catur Dwi Janati/ST 18/JIBI/Rinaldi Mohammad Azka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005